

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BENGKALIS  
PILKADA TAHUN 2020**

**Tesis**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas



Pembimbing I : Dr. Roni Ekha Putera, M.PA  
Pembimbing II: Dr. Aidinil Zetra, M.A

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

## ABSTRAK

Nama : Suci Ramadhani  
Program Studi : Program Magister Tata Kelola Pemilu  
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum  
(KPU) Kabupaten Bengkalis Pilkada Tahun 2020  
Pembimbing I : Dr. Roni Ekha Putera, M.PA  
Pembimbing II: Dr. Aidinil Zetra, M.A

Akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis pada Pilkada tahun 2020 dinyatakan bermasalah setelah diperiksa oleh pihak inspektorat. Permasalahan itu diketahui karena adanya temuan belanja barang yang tidak didukung oleh bukti-bukti administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis pada Pilkada tahun 2020 dengan menguraikan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori dimensi akuntabilitas yang terdiri dari konsep: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan pada tahap pelaporan, karena bendahara memangkas beberapa tugas unit pengelola keuangan lainnya dalam pencairan dan penggunaan anggaran. Pemangkasan tugas yang dilakukan bendahara mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis menjadi bermasalah, karena prosedur pengelolaan keuangan tidak berjalan sesuai aturan. Pelaksanaan dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran tidak berjalan dengan optimal, karena seluruh bagian pengelola keuangan kurang memahami aturan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Tupoksi masing-masing unit. Akuntabilitas proses juga bermasalah, karena bendahara tidak melaksanakan pengelolaan keuangan secara sistematis. Banyak tahapan administrasi yang dilewati dan tidak sesuai dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Berbeda dengan akuntabilitas program yang berhasil dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahap persiapan hingga akhir pemilihan. Akuntabilitas kebijakan juga menimbulkan permasalahan karena adanya kebijakan satu pintu yang dibuat oleh ketua KPU dalam mengelola anggaran yang tersedia. Faktor penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan anggaran ini diantaranya: kurangnya sarana dan prasarana, regulasi yang berubah-ubah, keterbatasan jumlah pegawai, kualitas SDM pegawai, kurangnya koordinasi dan komunikasi, tingginya ego sektoral pegawai dan intervensi dari komisioner, serta rendahnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara.

**Kata Kunci: Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan**

## ABSTRACT

Name : Suci Ramadhani  
Program Study : Election Governance Masters Program  
Title : Accountability of Financial Management of the General Election  
Commission (KPU) of Bengkalis RegencyRegional Election 2020  
Adviser I : Dr. Roni Ekha Putera, M.PA  
Adviser II : Dr. Aidinil Zetra, M.A

The Bengkalis Regency KPU's financial management accountability in the 2020 Pilkada was declared problematic after being examined by the inspectorate. Overcoming it is known because there are groceries that are not supported by administrative evidence. This study aims to describe the process of implementing accountability for the financial management of the Bengkalis Regency Election Commission in the 2020 Pilkada by outlining the causative factors. This research uses a qualitative descriptive approach with a case study method. Data analysis was carried out using the theory of accountability dimensions consisting of the concepts of: legal accountability and honesty, process accountability, program accountability and policy accountability. The results showed that the Bengkalis Regency KPU financial management process experienced problems at the reporting stage, because the treasurer cut several other financial management unit tasks in disbursing and using the budget. The reduction of duties carried out by the treasurer resulted in accountability for the financial management of the Bengkalis Regency KPU being problematic, because the financial management procedures did not work according to the rules. The implementation of the dimensions of legal accountability and honesty did not run optimally, because all parts of the financial manager did not understand the rules, especially those related to the implementation of the main duties and functions of each unit. The accountability process is also problematic, because the treasurer does not carry out systematic financial management. Many administrative stages have been passed and are not in accordance with accounting information systems, management information systems and administrative procedures. In contrast to the accountability program which was successfully implemented, from the preparatory stage to the end of the election. Accountability policies also cause problems because of the one-door policy made by the chairman of the KPU in managing the available budget. The causes of this budget management problem factor include: lack of facilities and infrastructure, changing regulations, limited number of employees, quality of employee human resources, lack of coordination and communication, high employee sectoral ego and intervention from commissioners, and low employee integrity in carrying out tasks and responsibilities as state civil servants

**Keywords: Legal and Honest Accountability, Process Accountability, Program Accountability, Policy Accountability**